

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Pelatihan dan Kemitraan (Studi pada Industri Meubel di Sulawesi Selatan)

Zainuddin Rahman

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

Abstract: The objective of this research is to discover and understand whether the preparation of resources by the government in the form of skill training and partnership has been successful in empowering Micro and small enterprises. The approach used in this research is qualitative one, which is based on phenomenology and puts emphasis on emic perspective (subject) and etic perspective (researcher, theory and other related information). The unit of analysis is the individual and situation. Data was collected through observation, in depth interview was conducted and documented. The main instrument in this research is the researcher. The result of improvement of resource through training and protection of micro small and medium enterprises through business partnership, has not been able to empower micro small and medium enterprises. The inability to the government to empower the micro and small enterprises for furniture industry in South Sulawesi through its partiality was caused by the incongruence between the existing formal agencies with the condition of local micro small and medium enterprises, the lack of capacity in the local training agencies

Keywords: Strategy, Empower, Training, Partnership Micro and small Enterprises

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang paling banyak menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi kalangan ekonomi lemah, karena sektor ini paling banyak melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, dibandingkan dengan usaha besar. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencerminkan wujud nyata dari kehidupan sosial dan ekonomi terbesar dari rakyat Indonesia

Pengalaman menunjukkan, berbagai program pembinaan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membina usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum sinkron satu sama lainnya. Salah satu wujud pembinaan adalah pemberian bantuan kredit dimana paket program pembinaan ini secara

umum kurang efektif, karena adanya persyaratan yang diterapkan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit mengedepankan persyaratan yang ketat, dengan alasan keamanan bank.

Persyaratan yang diterapkan oleh sektor perbankan pada umumnya hampir tidak dimiliki oleh usaha Mikro, karena UMKUM kebanyakan tidak memiliki kelengkapan administrasi bisnis, selain masih banyaknya UMKM yang informal, khususnya usaha Mikro atau usaha rumah tangga umumnya adalah informal (Infokop, 2004)

Menurut Infokop (2002:48) bahwa kemampuan usaha kecil dan menengah menyediakan kesempatan kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha besar, karena pada usaha besar sistem produksinya menggunakan sistem padat modal dengan adopsi teknologi tinggi, tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki kriteria dan syarat yang ketat sehingga untuk masuk usaha besar sangat sulit karena itu secara proporsional usaha besar memberi porsi yang kecil dalam penyediaan kesempatan kerja di Indonesia.

Alamat Korespondensi:

Zainuddin Rahman, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Kampus II UMI Makassar

Selain memperhatikan posisi UMKUM yang strategis dalam penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, maka perlu juga memperhatikan karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh UMKM dalam operasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Soetrisno (2004: 1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia selain menghadapi persoalan ketimpangan dalam struktur, persoalan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja antar sektor, juga menghadapi ketimpangan nilai tambah antar pelaku atau antar kelompok skala kegiatan. Pada kenyataannya kelompok usaha mikro non-formal paling besar kontribusinya terhadap penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Terjadinya ketimpangan antar kelompok usaha sebagai akibat adanya perbedaan dalam hal kemampuannya dalam mengelola usahanya selain itu juga diakibatkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola usaha tersebut hal itu merupakan kelemahan UMKM secara umum yang ada di Indonesia. Walaupun demikian UMKM masih tetap memiliki peran penting dalam menyediakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang besar.

Peran Pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan memainkan peran sangat penting sebagai Regulator, Fasilitator dan stabilitator di dalam pembangunan sehingga diharapkan dapat memberdayakan UMKM di Indonesia. Hal ini dapat ditempuh melalui strategi Pembinaan UMKM, melalui penyediaan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia untuk mendukung kelangsungan UMKM, serta keberpihakan terhadap UMKM. Strategi pemerintah sedapat mungkin melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan, pemagangan dan penataan usaha, termasuk formalisasi usaha, menyediakan pusat inkubasi bisnis UMKM, menyediakan fasilitas pendukung seperti lembaga perizinan yang lebih mudah dijangkau, lembaga pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM melakukan perlindungan terhadap UMKM dari sisi persaingan yang berlebihan dari perusahaan besar baik domestic maupun global

Pemberdayaan masyarakat sering menggunakan istilah pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi

kehidupan (AMA, 1993, dalam Suharto, 2005). Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia (Twelvetrees, 1991, dalam Suharto, 2005, 40).

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto, 2005).

Pembangunan bidang sosial merupakan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu inti dari pembangunan sosial adalah pengembangan atau pemberdayaan masyarakat sebagai suatu institusi sosial, termasuk unit-unit di dalamnya, seperti keluarga dan individu. Pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi (Migdley, 1995, dalam Adi, Isbandi; 2003,49)

Usaha kecil dan Menengah merupakan wacana yang ramai dibahas oleh berbagai kalangan, baik dalam lingkup pemerintah, lingkup politik dan lingkup pendidikan, namun masih menimbulkan berbagai istilah yang berbeda dan sering berganti-ganti di dalam menjelaskannya atau memberi arti karena istilah yang digunakan oleh masing-masing kelompok bervariasi, ada yang memberi istilah Usaha kecil, di sisi lain ada yang memberi istilah usaha kecil dan mikro, sehingga diperlukan sebuah konsep yang jelas mengenai UMKM sehingga dapat memberi arah dalam menjelaskan perbedaan UKM dan UMKM tersebut.

Krisnamurthi (2003) mengemukakan bahwa UMKM adalah para petani kecil/gurem, peternakan

kecil, nelayan kecil, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, industri kecil, industri rumah tangga usaha kerajinan, pedagang kecil, ceeran kecil, tukang sayur, tukang sate, abang becak, supir angkot, tukang sewa pompa, tukang kredit keliling kampung, tukang Koran dan sebagainya. Mereka adalah para pelaku ekonomi yang berada di sekitar kita sehari-hari, kita bertransaksi dengan mereka setiap hari, dan melalui kegiatan ekonomi mereka kehidupan kita terbantuan.

Berdasarkan pada pengertian UMKM dari berbagai sumber, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga rakyat Indonesia.

Menurut Tambunan (2005) klasifikasi usaha dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha yang menggunakan tenaga kerja antara 1–4 orang
- Usaha kecil adalah usaha yang menggunakan tenaga kerja antara 5–19 orang
- Usaha Menengah adalah usaha yang menggunakan tenaga kerja antara 20–50 orang tenaga kerja
- Usaha besar adalah usaha yang menggunakan tenaga kerja 50 orang ke atas.

Mangara, dkk. (2001), menyatakan bahwa rendahnya tingkat pemilikan legalitas usaha menyebabkan UKM mengalami kesulitan besar dalam mengakses sumber pemodal dari lembaga resmi. Data hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata 83% UKM dilokasi survey masih mengandalkan modal dari tabungan sendiri sebagai modal awal usahanya. Pemanfaatan lembaga keuangan formal sebagai sumber pemodal masih di bawah 10 persen. Data hasil survey ini tidak jauh berbeda dengan hasil pencacahan yang dilakukan oleh sensus ekonomi pada tahun 1996.

Priyono (2004:131) bahwa di Indonesia UKM/UMKM masih diperhadapkan pada berbagai persoalan, baik yang bersifat internal, (terkait dengan pengelolaan perusahaan) maupun external (terkait dengan lingkungan dunia usaha). Selanjutnya Asia Foundation (1998) dalam priyono (2004), masalah yang dihadapi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1)

masalah manajemen, (2) masalah permodalan, (3) masalah bahan baku, (4) masalah pemasaran, (5) masalah infrastruktur, (6) masalah teknologi, (7) masalah birokrasi dan (8) masalah kemitraan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini selain menggunakan metode kualitatif, juga memakai *perspektif fenomenologi* sebagai pendekatan. Karena fenomenologi memaknai perilaku manusia sebagaimana apa yang dilakukan dan dikatakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan pada tiga Kabupaten/Kota, yakni: Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) pada ketiga lokasi tersebut dapat memberikan informasi yang memadai karena lokasi yang dipilih memiliki jumlah (populasi) UMKM yang potensial juga dapat mewakili daerah lainnya.

Karakteristik Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah "situasi sosial", yang terdiri atas tiga komponen yaitu: (a) *Place* (tempat) yakni tempat di mana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung, (b) *Actor* (pelaku) adalah orang-orang yang sedang melakukan peranan, (c) *Activities* (aktivitas) adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Satuan pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan informan yang meliputi:

- (1) individu pelaku usaha UMKM industri meubel,
- (2) individu pejabat pemerintah dari dinas Perindustrian daerah penelitian,
- (3) individu Tokoh Bisnis daerah,
- (4) individu yang mewakili Tokoh Masyarakat yang memahami masalah.

Pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan

Metode Pengumpulan Data

- Obsevasi,
- Wawancara mendalam,
- Dokumentasi

Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data pada penelitian ini (kualitatif) adalah berbentuk siklus dan bukan linear sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KOMPARASI TEMUAN

Pemahaman: Pejabat pemerintah, Pelaku UMKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Organisasi Bisnis Daerah, terhadap Fungsi Pemerintah dalam Mempersiapkan Sumber Daya melalui Pelatihan Tenaga Kerja Bagi UMKM

Pemahaman tentang pemberdayaan dilihat dari sisi pelatihan sumber daya Manusia tampaknya masih belum mempunyai pandangan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat maupun *stakeholders* yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan pemahaman di antara mereka sebagai akibat cara pandang atau paradigma yang digunakan untuk memandang pelatihan sebagai sebuah cara pemberdayaan berbeda satu sama lainnya sehingga pendekatan ini sering terabaikan karena sebagian kelompok memandang dengan pesimis karena pelatihan yang dilakukan selama ini belum mampu memberdayakan UMKM.

Pemahaman Individu Pejabat Pemerintah terhadap Akses Pelatihan dan Penyiapan Sumber Daya

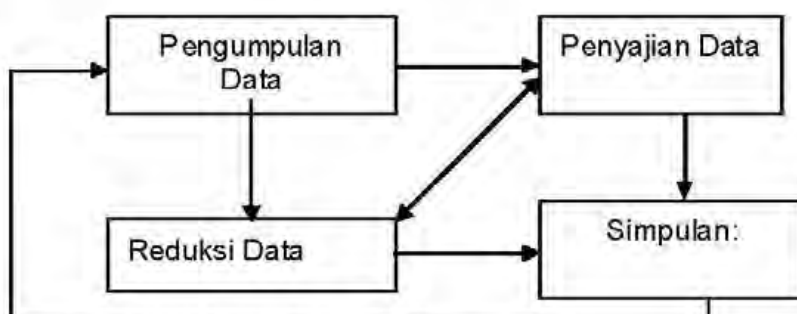
Pelatihan bagi UMKM selama ini masih sangat terbatas jumlahnya yang betul-betul menyentuh pada substansi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, karena lebih banyak pelatihan yang berorientasi dalam bentuk teoritis dan jarang yang dilakukan dengan kerja praktek, karena pertimbangan biaya yang besar.

Salah seorang dari Individu pejabat pemerintah, mewakili dinas perindag Kota Makassar yakni "Marten U.Karangan" mengungkapkan;

"Bahwa pelatihan yang dilaksanakan selama ini dalam lingkup perindag dapat dikatakan belum memadai dengan jumlah program yang harus dilaksanakan. Kurang memadainya pelatihan yang dilakukan sebagai akibat minimnyabdana untuk menjalankan program pelatihan yang ada "(wawancara, tanggal 05 Januari 2009). Selain itu sebuah penuturan yang disampaikan Bapak "Syahwarman" terkait dengan masalah pelatihan sebagai berikut;

"Berkat pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh para usaha industri meubel di Pare-pare sehingga dapat meningkatkan keterampilannya dalam membuat meubel dan juga meningkatkan kualitas produksi mereka" (wawancara, 12 Juli 2008, dan tanggal 15 Januari 2009).

Dari pemahaman kalangan pemerintah yang dikemukakan dapat dimaknai bahwa: fenomena pelatihan masih merupakan masalah yang belum dapat ditemukan solusinya secara baik, karena selain biaya yang mahal, tenaga dan waktu melakukan pelatihan merupakan kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat terwujud sebagaimana diharapkan. Salah satu



Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

(Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Muchsin, 2006, Bungin, 2003)

solusi yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinannya adalah pemerintah memberi kesempatan luas bagi Perguruan Tinggi, LSM, dan organisasi bisnis daerah, untuk mengadakan pelatihan dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator maupun mediator sehingga program pelatihan ini dapat berjalan secara berkesinambungan.

Pemahaman Individu Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Akses Pelatihan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan sebagai sebuah Upaya dalam memberikan kemampuan kepada kelompok yang kurang memiliki daya dalam mengatasi masalah hidupnya baik itu karena kemiskinan atau karena akibat mereka hanya kurang memiliki akses ke pada aktivitas ekonomi, sosial dan politik sehingga mereka tidak berdaya memberdayakan dirinya. Pemberdayaan juga sebuah strategi dalam artian bahwa jika pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, maka dengan sendirinya akan menjadi sebuah langkah (strategis) dalam menciptakan masyarakat menjadi berdaya.

Hal ini dirasakan oleh "Hasanuddin" salah seorang informan, ia adalah seorang pengrajin meubel dan juga seorang petani mengungkap tentang keterbatasan ketrampilannya, sebagaimana penuturannya sebagai berikut:

"Ketrampilan yang saya miliki adalah hanya merupakan ketrampilan turun temurun dari keluarga dan sulit untuk berkemvang karena tidak pernah mengikuti pelatihan apa lagi saya tinggal di desa yang jauh dari kota sehingga jarang menyaksikan perkembangan industri meubel yang ada di kota. Satu-satunya informasi yang dapat saya ketahui tentang industri meubel hanya dari siaran TV yang kadang-kadang ditayangkan itu pun kalau sempat menontonnya. Harapan saya kiranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat pelatihan yang khusus bagi pelaku UMKM seperti meubel supaya bisa ikut pelatihan untuk mencari tambahan pengetahuan dan pengalaman (wawancara tanggal 10 september 2008).

Berbeda dengan pengalaman yang dirasakan oleh informan "Mas Syafii" nama panggilan akrabnya dikalangan karyawan dan masyarakat sekitarnya. Pada awalnya Mas Syafii adalah salah seorang buruh

industri meubel di Pare-Pare, saat ini sudah menjadi seorang pengusaha industri meubel yang sukses menyatakan bahwa berkat pelatihan dan pemagangan yang diberikan kepada saya sehingga dapat memberikan peningkatan keterampilan dan pengaklaman hal itu diungkap seperti berikut:

"Bahwa sebelum mengikuti pelatihan dan melakukan magang di jepara saya masih merasa kesulitan dalam mendesain kursi dan lemari tipe jepara, tetapi setelah melalui magang selama tiga bulan sudah dapat melukis mengukir secara baik, di samping sudah mengetahui tipe meubel, sehingga meubel yang saya buat di Pare-pare sudah tidak dapat lagi dibedakan dengan meubel asli jepara. Bahkan saya sudah punya buku katalog tentang kursi versi Jepara dan versi pasuruan jawa Timur. Dari pengalaman saya itu sampai saat ini dalam membuat kursi sudah saya terapkan teknologi yang di gunakan orang jepara, hasilnya alhamdulillah sekarang dimilnati konsumen dan bahkan kewalahan melayani pesanan, artinya kualitas meubel yang dibuat ditempat saya ini sudah dipercaya orang di sini bahkan ada salah seorang cina di Kalimantan mau bermitra dengan saya untuk memasarkan produk meubel saya" (wawancara tanggal 17 Juli 2008 dan tanggal 14 januari 2009).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh informan pelaku industri meubel dalam kaitannya dengan pelatihan dapat dirumuskan kesimpulan bahwa Pelatihan sebagai sebuah strategi pemberdayaan adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku UMKM, namun keberpihakan pemerintah terhadap program pelatihan ini belum dapat dirasakan sama bagi seluruh pengusaha UMKM meubel di daerah ini, sehingga diharapkan agar program pelatihan ini dapat disosialisasikan secara menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM.

Pemahaman Individu Tokoh Bisnis Daerah terhadap akses Pelatihan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia

Pemahaman yang lain tentang pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, datang dari kalangan Tokoh Bisnis daerah, mereka menyatakan: "Bahwa kendala yang dihadapi oleh kebanyakan pelaku Bisnis UMKM adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki, sehingga

mereka kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjalankan bisnisnya, selain dukungan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat minim. Persolan minimnya kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, bukan disebabkan oleh kurangnya dana untuk pelatihan, melainkan memang program pelatihan itu sendiri belum konkrit seperti apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya dan apa sasaran pelatihan itu. Demikian halnya dengan pemahaman dari Tokoh masyarakat bahwa untuk memberdayakan UMKM meubel pelatihan merupakan salah satu solusi yang cukup penting karena melalui pelatihan, mereka dapat menerima pengalaman dan informasi tentang teknologi yang dapat digunakan dalam membuat usahanya berkembang.

Sejalan dengan uraian di atas, salah seorang individu Tokoh bisnis daerah dalam hal ini "Muh Ali Fauzi" mengungkapkan bahwa:

"Kendala yang dihadapi oleh kebanyakan pelaku Bisnis UMKM adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki. Sehingga mereka kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjalankan bisnisnya, selain itu dukungan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat minim, pada hal kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan pelaku bisnis UMKM" (wawancara tanggal 22 Nopember 2008)

Selain itu pendapat dari kalangan ahli dapat menjadi dasar untuk membandingkan pemahaman dari kalangan informan, terhadap pemberdayaan UMKM dipandang dari sisi pelatihan. Berdasarkan pandangan para ahli dari latar belakang disiplin yang berbeda dimungkinkan untuk memberi dasar dalam merumuskan sebuah konsep maupun teori pemberdayaan dengan pendekatan *fenomenologi*.

Djumilah (2002: 191) bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pemakaian teknologi yang kurang produktif, membuat UMKM menjadi sulit untuk berkembang, karena itu diharapkan peran pemerintah untuk mendorong seluruh *Stakeholders* yang ada agar dapat berpartisipasi untuk menggalakan pelatihan agar dapat terjangkau oleh UMKM. Pelatihan memang masih belum merupakan strategi yang diprioritaskan, hal ini disebabkan oleh karena pemahaman kebanyakan pihak menilai bahwa pelatihan itu hampir tidak ada hasilnya, karena memang

substansi materi pelatihan yang diberikan tidak menyentuh kebutuhan pelaku, melainkan kebanyakan pelatihan dilaksanakan sesuai kepentingan

Berdasarkan pemahaman informan dari berbagai kalangan dan pendapat para ahli, maka dapat dirumuskan sebuah konsep teori pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari sisi pemihakan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya UMKM melalui pelatihan sebagai berikut:

"Bahwa strategi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pelatihan untuk mempersiapkan sumber daya pelaku UMKM, maka tidak ada pilihan lain kecuali menggiatkan pelatihan dan pemangaman, bagi UMKM agar dapat meningkatkan keterampilannya. Pada umumnya pelaku UMKM memiliki keterampilan yang rendah, sehingga untuk membuat mereka berdaya, maka pemerintah harus membantu mereka melalui pelatihan. Untuk efektifnya pelaksanaan program pelatihan bagi UMKM, maka keterlibatan seluruh stakeholders (Perguruan tinggi, LSM, Swasta dan pemerintah) secara sungguh sungguh atas dukungan pemerintah melalui regulasi dan penyediaan fasilitas kepada pelaksana program pelatihan".

DISKUSI HASIL PENELITIAN

Memaknai Pemberdayaan Yang dilakukan oleh Pemerintah

Pemahaman tentang pemberdayaan memiliki banyak makna tergantung pada sisi mana pemberdayaan itu dipandang, sehingga pemahaman tentang pemberdayaan yang muncul ke atas permukaan menjadi beragam, namun yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana usaha untuk mengimplementasikan dalam sebuah wujud nyata sehingga dapat menjadi sebuah kenyataan dan bukan sebagai sebuah wacana saja. Sudah sekian banyak program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semenjak Pemerintahan Orde Baru sampai pada Pemerintahan Bersatu, namun masih bias dari harapan dan kebanyakan gagal mencapai sasaran riil.

Berdasarkan hasil pengungkapan dari berbagai kalangan informan tersebut (perspektif emic), kemudian dilakukan pemaknaan berdasarkan pendekatan fenomenologi, untuk memperoleh makna dari sejumlah pengungkapan maupun informasi yang tidak

diungkapkan oleh informan tetapi berasal dari subyek dalam bentuk situasi sosial (konteks, peristiwa, makna) dari subyek yang diamati. Selain itu dilakukan pula penelusuran informasi melalui penelusuran dokumen, literatur, dan hasil penelitian (triangulasi), dengan harapan untuk tidak membuat temuan ini menjadi sangat subyektif (perspektif *etic*), sehingga hasil penelitian memiliki: tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Langkah yang dilakukan dalam menyusun konsep dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan dan telaah secara mendalam melalui diskripsi dan analisis diskripsi dari makna fenomena, yang direkam dari tindakan dan pengungkapan informan. Dari hasil pemaknaan pemahaman kalangan informan, dapat dirumuskan sebuah konsep pemberdayaan dalam lingkup UMKM meubel di Sulawesi Selatan, yang meliputi dimensi yakni: dimensi pelatihan, dan dimensi kemitraan. Dari setiap dimensi akan dapat diketahui bagaimana pemahaman kalangan pemerintah, kalangan pelaku usaha, kalangan Tokoh bisnis daerah, dan kalangan Tokoh Masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta makna pemberdayaan itu sendiri menurut pemahaman mereka.

"Pemberdayaan dipandang dari sisi keberpihakan pemerintah dalam menyediakan Sumberdaya UMKM melalui pelatihan".

Pemahaman kalangan informan terhadap pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelatihan, dipandang masih belum efektif pelaksanaannya, karena selama ini kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi yang berkopeten seperti Dinas Perindag dan Dinas Nakertrans dipandang belum mampu menjawab masalah rendahnya kualitas pelaku industri skala mikro, kecil maupun menengah. Kurang efektifnya program tersebut, sebagai akibat adanya keterbatasan dana, selain itu jumlah UMKM yang tidak mungkin dijangkau semua jika hanya beberapa institusi saja.

Kurangnya sosialisasi program pelatihan selama ini disebabkan oleh adanya perubahan kewenangan pemerintah pusat untuk membuat perencanaan pelatihan bagi daerah-daerah karena pemerintah masing-masing daerah sudah memiliki rencana pengembangan sendiri-sendiri, sehingga program pelatihan sejak

Otonomi daerah menjadi tidak berjalan seragam di seluruh daerah, sehingga tidak heran jika ada daerah yang pelatihan dan pemagamannya berjalan, seperti Kota Parepare sementara banyak daerah yang tidak berjalan program pelatihan dan pemagaman karena prioritas masing-masing daerah berbeda. Pemerintah daerah yang memahami pelatihan sebagai sebuah program yang kurang penting tentu tidak menetapkan pelatihan dan pemagaman sebagai sebuah prioritas, melainkan sebagai sebuah program kerja saja.

"Pemahaman informan terhadap pola pemberdayaan melalui pelatihan dirasakan masih kurang", sehingga diperlukan adanya kesungguhan pemerintah daerah untuk melakukan kepemihakan membantu memfasilitasi program pelatihan tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi melakukan pelatihan seperti: Perguruan tinggi, LSM, dan Organisasi Bisnis daerah (KADIN), sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mempersiapkan sumber daya UMKM yang terampil yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas UMKM itu sendiri melalui keterampilan mereka dalam berusaha dan bekerja.

Bagaimana pendapat para ahli memahami program pelatihan dalam rangka memberdayakan UMKM. Kalangan ahli berpendapat sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh kalangan informan. Bahwa pemberdayaan dipandang dari sisi keberpihakan pemerintah melakukan kemitraan antara usaha UMKM dengan usaha besar adalah merupakan suatu langkah strategis yang patut dilaksanakan oleh pemerintah supaya dapat mendorong lahirnya kerja sama antara pengusaha UMKM dengan pengusaha besar. Kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar diharapkan dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak yang bermitra. Bagi anak angkat (usaha mikro dan kecil) akan mendapat manfaat berupa bantuan modal, akses pasar dan teknologi, sedangkan dari pihak pengusaha besar, dapat mengurangi resiko mereka dalam melakukan produksi, karena sebagian dari biaya operasional produksi dapat digeser ke usaha mitra, sehingga jika terjadi goncangan karna kebijakan ekonomi makro ataupun pengaruh global, pengusaha besar sebagai bapak angkat bisa mengurangi resikonya.

Kemitraan bagi kalangan informan pada saat ini dinilai bahwa sosialisasinya sangat kurang sehingga

hanya sedikit saja perusahaan yang bermitra. Rendahnya keinginan bermitra dari kalangan pengusaha besar, karena belum termotivasi dengan peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mengefektifkan program pemberdayaan UMKM melalui pola kemitraan, seyogianya pemerintah daerah sudah membuat peraturan daerah mewajibkan kemitraan tersebut bagi perusahaan besar untuk membina UMKM, dengan pola-pola kemitraan yang dapat dilakukan. Kemitraan menurut pengungkapan beberapa informan dalam penelitian ini mengakui bahwa dengan adanya kemitraan usahanya dapat berjalan dengan lancar karena mendapat bantuan modal pinjaman dengan bunga rendah dan pengembalian dalam jangka lima tahun. Dari hasil pengungkapan dapat dimaknai bahwa kemitraan usaha memberikan manfaat yang besar bagi usaha UMKM.

"Pendapat dari kalangan ahli, juga mengakui bahwa pola kemitraan sangat penting artinya bagi pemberdayaan usaha skala mikro kecil, agar mereka dapat mempermudah untuk mengakses permodalan, pasar, dan teknologi produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kim-Sum (2005) bahwa dalam memberdayakan UMK, kemitraan adalah merupakan faktor penting harus diperhatikan, karena dengan kemitraan, perusahaan kecil dengan perusahaan besar dapat menciptakan pasar baik lokal, regional maupun internasional sehingga usaha kecil dapat memperoleh pasar yang besar. Selanjutnya, Thee (2002) menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan pasar input maupun pasar output bagi UMKM, pemerintah memiliki peran yang sangat strategi membangun kemitraan antara UMKM dengan usaha besar melalui regulasi, sebagaimana halnya dengan Jepang, Korea, dan Taiwan, pemerintah negara tersebut berusaha membangun kemitraan antara UMKM dengan usaha besar melalui sub Kontrak dan dengan cara seperti itu mereka berhasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa keberpihakan pemerintah dalam melakukan penyiapan sumber daya UMKM melalui pelatihan, berdasarkan pemahaman kalangan informan dapat dimaknai bahwa upaya penyiapan sumber daya

melalui pelatihan belum dapat dirasakan secara baik oleh para pelaku UMKM meubel, oleh karena itu diharapkan agar kebijakan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan sumber daya pelaku UMKM, dapat disosialisasikan secara luas, agar dapat memberikan pelayanan secara intensif kepada pelaku UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilannya sehingga dapat berdaya

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Kepada para pelaku usaha, agar dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan dan mendorong peningkatan kemampuan keterampilan, agar dapat menjadi sukses sedapat mungkin aktif mengikuti pelatihan dan berusaha mencari mitra usaha. Selain itu dibutuhkan profesionalisme dalam melakukan usaha, karena profesionalisme dapat mendorong menjadi sukses dalam usaha.

Kepada Kalangan Tokoh Bisnis dan Tokoh masyarakat diharapkan keterlibatannya dalam membantu pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UMKM, melalui penyediaan pelatihan, dan pola kemitraan agar dapat mendorong UMKM menjadi sukses.

Kepada kalangan Perguruan Tinggi dan LSM, kiranya dapat mengambil bagian dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pola kemitraan untuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM agar dapat berhasil.

KETERBATASAN PENELITIAN DAN ARAHAN SELANJUTNYA

Pada penelitian ini dapat dilihat bagaimana melakukan pemberdayaan bagi UMKM dalam mendorong menjadi sukses, dipahami oleh kalangan pemerintah, pelaku usaha, kalangan Tokoh masyarakat dan kalangan Tokoh Bisnis daerah. Dari perspektif fenomenologi penelitian ini secara teoritik (1) mampu memahami tindakan individu secara mendalam sehingga dapat mengahasil proposisi kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan, (2) mampu memahami makna tindakan melalui proses pemaknaan apa yang berada di balik fenomena, (3) tidak hanya menekankan pada perilaku (aksi) tetapi lebih menekankan pada apa di balik tindakan subyek.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil temuan penelitian ini hanyalah berangkat dari pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi, artinya bahwa penelitian ini bukan penelitian kebijakan untuk dapat digunakan menilai apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak melainkan merupakan pengembangan teori pemberdayaan UMKM berdasarkan pada pemahaman individu dan dukungan informasi lainnya. Karena itu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: (1) hanya dilakukan dalam bidang kajian industri meubel. Untuk itu diharapkan untuk melakukan kajian pada bidang yang lebih luas sehingga dapat menjadi sempurna, (2) penelitian ini hanya dilakukan secara terbatas pada tiga daerah, yakni Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Luwu, karena itu diharapkan untuk dilakukan pada berbagai daerah lainnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini. Untuk itu penulis berharap bahwa dikemudian hari ada peneliti-peneliti lain yang dapat memperbaiki temuan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, I. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Basrowi, dan Sudikin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia Surabaya.
- Bungin, B. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Djumilah. 2002. *Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Erwidodo. 1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan "Modernisasi dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan"*. Penerbit PT. Bina Rena Pariwisata.
- Infokop. 2004. Kinerja Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah. Jurnal Infokop Nomor 25 Tahun XX. 2004.
- Kim -Sum. 2005. *Key Challenges For SMEs Development in Asia and The Pacific and to Bring Six Strategic Choices to Your Attention*. UNESCAP.
- Kementrian Koperasi dan UKM. 2003. *Kebijakan dan Program Kementrian Koperasi dan UKM 2004*. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat.
- Krisnamurthi, B. 2003. *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: "Ekonomi Rakyat dengan Cara Berekonomi Mereka Sendiri"*, Disampaikan pada Kongres XV ISEI, Malang Jawa Timur.
- Mangara. 2001. Prospek Perdagangan Domestik yang Bebas dalam Era Desentralisasi dan Dampaknya atas Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Centre for Economic and Social Studies (CESS) PRISM Project, The Asia Foundation.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Noor, S. 2004. Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009. Jurnal Infokop Nomor 25 Tahun XX. 2004, pp 1-9.
- Prawirokusumo, S. 2001. *Ekonomi Rakyat "Konsep, Kebijakan, dan Strategi"* Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Priyono, Edy. 2004. *Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia*. "Usaha Kecil sebagai Basis Strategi Pembangunan Ekonomi". Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9 No. 2 Agustus 2004.
- Salladien. 2006. *Pengantar, Fokus, Kajian Pustaka, Paradigma, Keabsahan Data dan Analisis Dalam Terapan Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tambunan, T. 2005. Promoting Small and Medium Enterprises With A Clustering approach: A Policy Experience From Indonesia. *Journal of Small Business Management*; Apr 2005; 43,2: ABI/INFORM Research pp 138-154.
- Thee. 2004. *Pembangunan, Kebehasan, dan Mukjizat Orde Baru*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta Tahun 2004.
- Yetty, S. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Pendekatan Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yunus, M. 2007. *Bank Kaum Miskin "Kisah Yunus dan Gramen Bank Memerangi Kemiskinan"*. Penerbit: PT. Cipta Lintas Wacana Jakarta. Dicitak oleh Batu Merah. e-mail: batu_merah@telkom.net.